

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penyajian dan analisa data penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak semua kegiatan pelayanan bidang pertanahan di Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan se-kotamadia sebagai sumber pendapatan baik yang masuk ke Kas Pemerintah DKI Jakarta maupun Kas Negara. Sedangkan yang masuk ke Kas Negara adalah dari penerimaan pengukuran dan pendaftaran tanah dan yang masuk ke Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta adalah dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah
2. Perkembangan pendapatan negara di Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta setiap tahunnya tidak selalu mengalami kenaikan. Besarnya peningkatan pendapatan negara untuk tahun 1994/1995 adalah sebesar Rp. Rp.2.325.571.961.070,00 atau sebesar Rp. 333,00% Tahun 1995/1996 peningkatan pendapatan sebesar Rp. 56.661.827.72.800,00 atau sebesar 187,38%, Tahun 1996/1997 bila dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan pendapatan negara sebesar Rp.-7.893.839.617.330,00 atau sekitar -90,84%. Sedangkan untuk tahun 1997/1998 terjadi peningkatan Rp.118.586.387.053,00 atau sekitar 14,89%. Jadi rata-rata peningkatan pendapatan negara di Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan mulai tahun 1994/1995 sampai dengan 1998/1999 adalah Rp.54.125.375.898,25 atau sekitar 31,00%.
3. Dukungan dana pembangunan yang diberikan terhadap Pemerintah DKI Jakarta selama lima tahun anggaran selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 1994/1995 dukungan dana yang diberikan sebesar Rp. 20.642.780.713,00 atau sekitar 0,95% tahun 1995/1996 dukungan dana yang diberikan sebesar Rp. 30.518.407.239,00 atau sekitar Rp. 1.15%, tahun 1996/1997 dukungan dana yang diberikan sebesar Rp. 48.283.837.069,00

atau sekitar Rp. 1,69%. Tahun 1997/1998 dukungan dana yang diberikan sebesar Rp. 70.163.953.537,00 atau sekitar Rp. 2,49%. Dan untuk tahun 1998/1999 dukungan dana yang diberikan adalah Rp. 115.136.953.537.794,00 atau sekitar 4.75%.

4. Upaya untuk peningkatan pendapatan dari bidang pertanahan adalah dengan mengoptimalkan pegawai yang ada dengan mengadakan lembur, sesuai dengan kemampuan anggaran.dalam DIK yang ada. Upaya lain yang dilakukan juga melakukan penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat secara berkala baik masyarakat umum maupun pejabat pelaksana yang berkaitan dengan bidang pertanahan misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah. Di samping hal tersebut upaya untuk meningkatkan pendapatan dari bidang pertanahan juga telah dilakukan melalui Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah.

#### **B. Saran-saran**

1. Diharapkan Kantor Wilayah BPN Jakarta dan Kantor Pertanahan membuat pengumuman mengenai jenis-jenis kegiatan pelayanan yang merupakan sumber pendapatan baik yang masuk ke Kas Negara maupun ke Kas Daerah
2. Diharapkan Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan dapat mengintensifkan dan meningkatkan pemasukan keuangan kepada negara maupun daerah yang berasal dari tugas-tugas bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan penyuluhan mengenai pertanahan kepada masyarakat dan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertin Pertanahan sehingga urusan kerja dapat berjalan lancar.
4. Pemberian bantuan insentif kepada instansi pertanahan karena ikut serta dalam menyumbangkan uang pemasukan kepada Kas Negara maupun Kas Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Badan Pertanahan Nasional (1993), Keputusan Kepala BPN Tentang Kebendaharaan dan Penyelenggaraan Tata Pembukuan Bendaharawan di Lingkungan BPN.
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional (1995), Perolehan Tanah Bagi Perusahaan.
- Harsono, Boedi (1994), Himpunan Peraturan –Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan.
- Harsono, Boedi (1997)” Hukum Agraria Indonesia, Pembentukannya UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Masri Singarimbun dkk (1987)” Metode Penelitian LP3S, Jakarta.
- Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (1997) “Masalah Pertanahan Memasuki Era Globalisasi”, Makalah Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XXXIX Universitas Janabadra.
- Menteri Negara Agraria/Kepala Bpn (1998) “Sambutan Kunci Dalam Acara Seminar Nasional Pertanahan”, Seminar Nasional Pertanahan Pemberdayaan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Teknis, Agama dan Budaya.
- Nazir. Moh, (1983)” Metode Penelitian LP3S, Jakarta.
- Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (1997), Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Propinsi DKI Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1998), Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek Pertanahan Terpadu di Kantor Wlayah BPN Propinsi DKI Jakarta.